



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAGELANG**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2025**

**KOTA MUNGKID
2026**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025. LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP. Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kota Mungkid, 23 Februari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang



DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196805111998031005

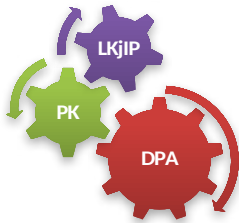
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Aspek Strategis Organisasi	4
E. Permasalahan Utama Organisasi	10
F. Sistematika	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Evaluasi Kinerja	25
BAB IV PENUTUP	55
A. Tinjauan Umum Keberhasilan	55
B. Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja.....	56.....
C. Strategi Pemecahan Masalah.....	56.....
LAMPIRAN	58..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

LKjIP Tahun 2025 yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik

A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Aspek Strategis Organisasi

- 1. Visi dan Misi**
- 2. Letak Geografi**
- 3. Pembagian Wilayah Organisasi**
- 4. Organisasi Perangkat**

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);

8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP adalah:

1. Menilai tingkat capaian kinerja dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.
3. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk peningkatan kinerja.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Aspek Strategis Organisasi

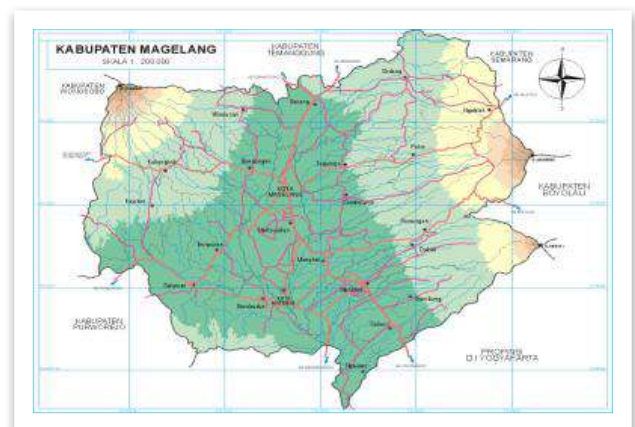
1. Visi dan Misi

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada rencana strategis Tahun 2025-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang Periode Tahun 2025-2026. Dokumen RPD tersebut bersifat transisi sampai dengan Bupati Magelang terpilih dan definitive dan dalam dokumen RPD 2025-2026 tidak terdapat visi misi kepala daerah. Dokumen ini diperlukan sebagai pedoman bagi pejabat kepala daerah untuk memastikan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya dokumen RPD ditindaklanjuti oleh seluruh kepala perangkat daerah dengan menyusun Renstra PD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026.

Tujuan jangka menengah perangkat daerah Tahun 2025-2026 diartikan sebagai sesuatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan perangkat daerah selama periode Tahun 2025-2026. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan selama periode Tahun 2025-2026. Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang periode periode Tahun 2025-2026 adalah **Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**

2. Letak Geografi

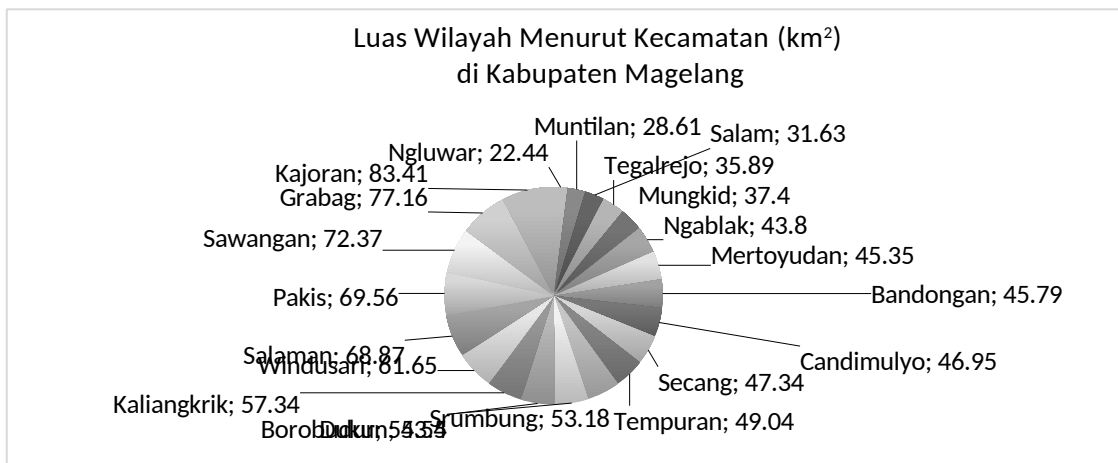
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, berada tepat di pusat ibukota Kabupaten Magelang yaitu di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 6, Kota Mungkid, Kecamatan Mungkid dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis



Kabupaten Magelang terletak diantara 110° – 01' - 51" Bujur Timur, 110° – 26' - 58" Bujur Timur, 7° - 19' - 13" Lintang Selatan dan 7° - 42' - 16" Lintang Selatan.

Kabupaten Magelang berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Selain berbatasan dengan 5 kabupaten dan 1 daerah istimewa di sebelah utara, selatan, timur dan barat Kabupaten Magelang juga berbatasan dengan Kota Magelang yang terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang.

3. Pembagian Wilayah Organisasi



Kabupaten Magelang secara administratif dibagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih 1.129.983 km² (112.998 hektar) atau kurang lebih 2,22% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Magelang yang paling luas yaitu Kecamatan Kajoran sebesar 8.677.80 hektar sedangkan wilayah yang luasnya paling kecil yaitu Kecamatan Ngluwar seluas 2.396,36 hektar.

4. Organisasi Perangkat Daerah

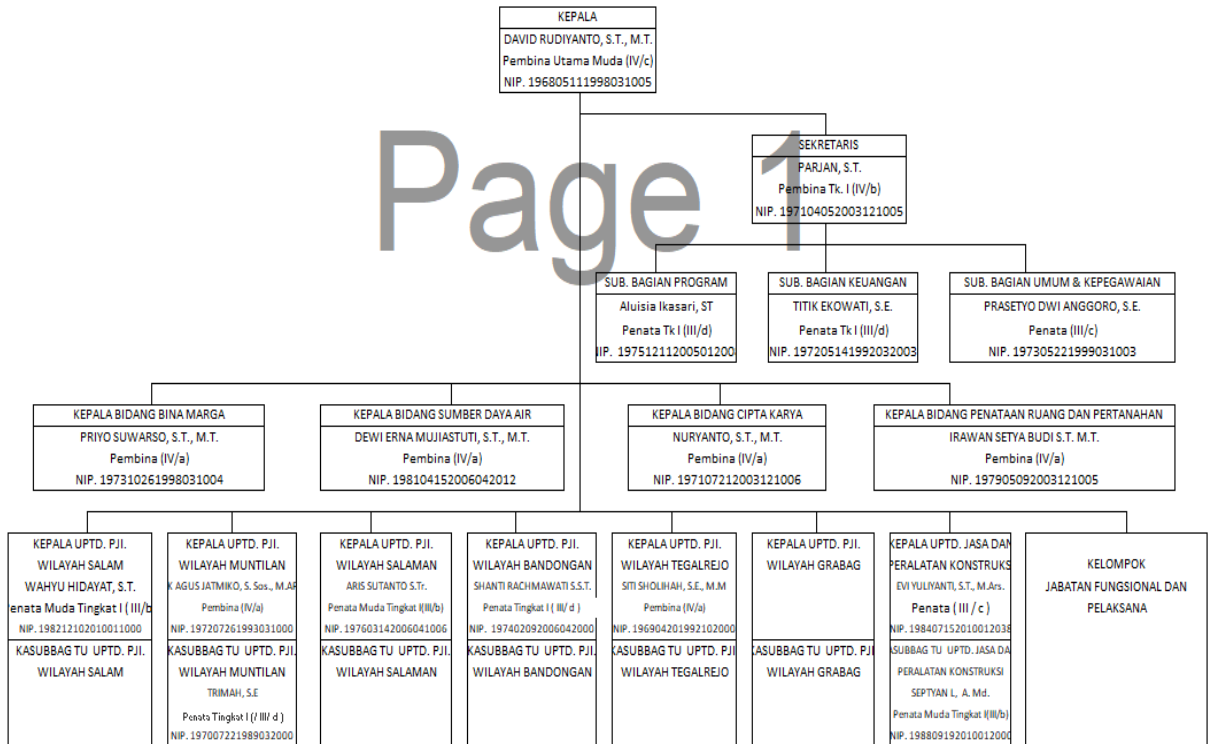
a. Dasar Hukum Organisasi

Dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75) dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 62 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGELANG



Sumber : Peraturan Bupati Magelang Nomor 62 Tahun 2023

c. Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
 - a) Perumusan kebijakan bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Penataan Ruang, Pertanahan, dan Kesekretariatan;
 - b) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Penataan Ruang, dan Pertanahan;
 - c) Pelaksanaan kebijakan bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Penataan Ruang, dan Pertanahan;
 - d) Pelaksanaan administrasi bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - e) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - f) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;
 - g) Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - h) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan; dan

- i) Pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang sampai dengan akhir Desember 2024 sebanyak 145 orang. Data PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel berikut :

- 1. Data jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 1.1 Jumlah PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Ka Subbag/ Kepala UPT/ Ka Subbag TU	13
5.	Fungsional Umum	122
	Jumlah	141

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang 31 Desember 2025

- 2. Data Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menurut tingkat pendidikan

Tabel 1.2 Jumlah PNS Menurut Tingkat Kependidikan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	11
2.	Sarjana (S1)	38
3.	Sarjana Muda (D3)	12
4.	SLTA	57
5.	SLTP	19
	Jumlah	141

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang 31 Desember 2025

3. Data Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menurut golongan

Tabel 1.3 Jumlah PNS Menurut Golongan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	10
2.	Golongan III	79
3.	Golongan II	49
4.	Golongan I	3
	Jumlah	141

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang 31 Desember 2025

4. Data Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menurut eselon

Tabel 1.4 Jumlah PNS Menurut Eselon Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

No	Eselon	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	13
4.	Non Eselon	122
	Jumlah	141

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang 31 Desember 2025

e. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
	Peralatan dan Mesin		
a	1) Mesin Gilas 2) Wacker 3) Pan Mixer 4) Sprayer 5) Mini Excavator 6) Excavator Backhoe 7) Backhoe Loader 8) Vibro Roller 9) Trailer/Fuso 10)Mesin Potong Rumput	16 1 3 5 2 1 1 1 1 1 50	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
b	Alat Angkutan		
	- Kendaraan Dinas Roda Empat - Kendaraan Dinas Roda Enam - Kendaraan Dinas Roda Tiga - Kendaraan dinas roda dua	11 7 6 82	Unit Unit Unit Unit
c	Alamat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Komputer - Laptop - Printer - Mesin Ketik - Meja - Kursi - Kursi Lipat - LCD Projector - Gps - Kamera - Drone	 34 76 50 16 276 370 51 8 20 20 1	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
	Bangunan dan Gedung		
-	Bangunan Kantor	13	Unit

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang 31 Desember 2025

E. Permasalahan Utama Organisasi

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Magelang diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya kapasitas pelayanan jalan dan kemantapan jalan sesuai masa layanan jalan, lebar jalan yang belum memenuhi standar masih banyak.
2. Banyaknya kondisi jaringan irigasi yang rusak/belum terbangun dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memelihara saluran irigasi.
3. Belum terpenuhinya capaian dan layanan pengelolaan sanitasi layak dan pengembangan air minum layak (100%) ini dikarenakan pembangunan sanitasi dan air minum belum menjadi prioritas pembangunan daerah, perilaku hidup sehat dimasyarakat masih kurang dan kondisi sumber mata air dan debit saat ini berkurang kadang kala lahan untuk bangunan sipil dan jaringan sering menjadi konflik.
4. Masih perlunya gedung – gedung pemerintah direnovasi agar berfungsi lebih baik atau layak fungsi.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendirikan bangunan yang berorientasi Tata Ruang serta mengurangi resiko bencana alam.

F. Sistematika

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi peta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Evaluasi Kinerja

Sub Bab ini menyajikan Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian kinerja sasaran agar di peroleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja 2025.

BAB IV PENUTUP

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran berisikan data pendukung berupa Struktur organisasi, Perjanjian Kinerja eselon II, III dan IV Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja yang disusun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2025 telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen ini merupakan tekad dan janji yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian kinerja ini hakikatnya merupakan komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2025.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 beserta perubahannya disusun mengacu pada Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan perubahannya, Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2026 dan Dokumen Penyusunan Anggaran Tahun 2025 termasuk perubahannya. Indikator

kinerja utama dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target		Keterangan
			2025	2026	
1	<i>Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang</i>	<i>Persen</i>	<i>93,03</i>	<i>93,33</i>	<i>Non akumulasi</i>

Sumber : Renstra DPUPR Tahun 2025-2026

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Ket.
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persen	84,58	84,60	
2		Cakupan Layanan Air Minum **	Persen	93,92	94,57	
3		Cakupan Layanan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan	Persen	100	100	
4		Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik **	Persen	92,56	93,30	
5		Cakupan Layanan Drainase Lingkungan	Persen	100	100	
6		Cakupan Layanan Infrastruktur	Persen	100	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Ket.
				2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
		Permukiman				
7		Cakupan Penataan Bangunan Gedung	Persen	100	100	
8		Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persen	100	100	
9		Cakupan Penyelenggaraan Jalan	Persen	85,20	85,70	
10		Cakupan Layanan Pengembangan Jasa Konstruksi	Persen	100	100	
11		Cakupan layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	88	88,50	
12		Cakupan Layanan Kinerja Pertanahan	Persen	100	100	

Sumber : Renstra DPUPR Tahun 2025-2026

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 memuat 1 (satu) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja dan besaran anggaran dalam mendukung pelaksanaan perjanjian kinerja. Jumlah anggaran pada pelaksanaan perjanjian kinerja Tahun 2025 mengacu pada jumlah Perubahan Anggaran Tahun 2025 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.536.319.270,93
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	13.623.709.845,44
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.045.936.226
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.738.870.157
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.053.054.466,07
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	369.796.135

	Drainase	
7	Program Penataan Bangunan Gedung	18.697.618.965
8	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	191.561.168
9	Program Penyelenggaraan Jalan	40.124.514.397
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	280.951.989
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	643.617.959
12	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	34.459.130
Jumlah:		112.216.730.603,20

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan DPUPR Tahun 2025

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang telah melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu 1 (satu) Urusan Wajib Pelayanan Dasar dengan 11 program dan 20 kegiatan, dan 1 (satu) Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan 1 program dan 1 kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp. 112.216.730.603,20.

Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 12 Program dan terdiri dari 21 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 112.216.730.603,20 terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp 94.985.730.603,20 dan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 17.231.000.000,00.

Kegiatan yang dilaksanakan di DPUPR Kabupaten Magelang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang, Bantuan Keuangan Gubernur dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025.

Untuk mengetahui dukungan penganggaran terhadap capaian kinerja pada tiap sasaran strategis maka dilakukan pemetaan program dan anggaran per sasaran strategis Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang sebagai berikut :

Tabel 2.4 Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum		100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah	20.536.319.270,93	18,30

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
	dan Penataan Ruang			Daerah Kabupaten/Kota		
2		Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air	84,58%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	13.623.709.845,44	12,14
3		Cakupan layanan air minum ***	93,92%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.045.936.226,00	1,82
4		Cakupan Layanan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan	100,00%	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.738.870.157,00	5,11
5		Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik ***	92,56%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.053.054.466,07	6,29
6		Cakupan Layanan Drainase Lingkungan	100,00%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	371.859.450,00	0,33
7		Cakupan Penataan Bangunan Gedung	100%	Program Penataan Bangunan Gedung	19.175.783.037,88	17,09
8		Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	100,00%	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	191.577.949,00	0,17

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
9		Cakupan penyelenggaraan Jalan	85,20%	Program Penyelenggaraan Jalan	42.406.189.464,88	37,79
10		Cakupan layanan pengembangan Jasa konstruksi	100,00%	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	288.206.500,00	0,26
11		Cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang	100,00%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	747.022.749,00	0,67
12		Cakupan Layanan kinerja pertanahan	100,00%	Program Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	38.201.487,00	0,03
Jumlah :					112.216.730.603,20	100,00

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang merupakan perwujudan

**AKUNTABILITAS
KINERJA
A. Capaian
Kinerja
Organisasi**

keajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Kepala DPUPR Kabupaten Magelang untuk tahun 2025. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan tersebut.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator dan dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target

capaian pada akhir periode renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang.

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis indikator, yaitu: *indikator positif* dan *indikator negatif*, dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

- *Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja, dengan rumus:*

Presentase Capaian Kinerja

$$(Indikator\ Positif) = \frac{Realisasi}{Rencana} \times 100\%$$

- *Indikator Negatif apabila semakin tinggi tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negative, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai, dengan rumus:*

Presentase Capaian Kinerja

$$(Indikator\ Negatif) = \frac{Rencana - (Realisasi - Rencana)}{Rencana} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/ Warna Realisasi

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri 86 tahun 2017

Persentase capaian kinerja sasaran strategis per indikator pada Tahun 2025 dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2025 sesuai Renstra 2025-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran per Indikator

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2023	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80,60	88,67	93,03	93,13	100,11	93,33	99,78
1.		Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air	84,56	84,57	84,58	84,60	100,02	84,60	100,00
2.		Cakupan Layanan Air Minum **	92,49	94,34	93,92	95,54	101,72	94,57	101,03
3.		Cakupan Layanan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.		Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik **	91,52	92,28	92,56	95,08	102,72	93,30	101,91
5.		Cakupan Layanan Drainase Lingkungan	5,37	51,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.		Cakupan	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Penataan Bangunan Gedung							
7.		Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.		Cakupan Penyelenggaraan Jalan	84,43	87,09	85,20	81,81	96,02	85,7	95,46
9.		Cakupan Layanan Pengembangan Jasa Konstruksi	95,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.		Cakupan layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	87,50	100,00	88,00	88,00	100,00	88,50	99,44
11.		Cakupan Layanan Kinerja Pertanahan	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata							109,15		

Sumber : Monitoring Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan 1 (satu) sasaran strategis, memiliki 1 indikator kinerja utama, dan 11 indikator kinerja program. Realisasi keuangan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.536.319.270,9 3	19.228.048.342,0 0	93,63
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	13.623.709.845,4 4	9.000.338.203,00	66,06
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.045.936.226,00	2.037.530.864,00	99,59
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan	5.738.870.157,00	5.609.548.120,00	97,75

	Persampahan Regional			
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.053.054.466,07	7.050.685.080,00	99,97
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	371.859.450,00	369.796.135,00	99,45
7	Program Penataan Bangunan Gedung	19.175.783.037,88	18.697.618.965,00	97,51
8	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	191.577.949,00	191.561.168,00	99,99
9	Program Penyelenggaraan Jalan	42.406.189.464,88	40.124.514.397,00	94,62
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	288.206.500,00	280.951.989,00	97,48
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	747.022.749,00	643.617.959,00	86,16
12	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	38.201.487,00	34.459.130,00	90,20
	Jumlah :	112.216.730.603,20	103.268.670.352,00	92,03

Sumber: SIPD Kabupaten Magelang Tahun 2025

Dalam pelaksanaan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 didukung 12 program, 21 kegiatan, dan 55 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp **112.216.730.603,20** dan realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran strategis sebesar Rp **103.268.670.352,00 (92,03%)**. Persentase realisasi keuangan masuk dalam kategori sangat tinggi, tetapi masih terdapat 1 (satu) program masuk kategori sedang dengan capaian 66,06%, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) karena terdapat 3 paket pekerjaan dengan sumber dana dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi (anggaran Perubahan) sebesar Rp 4.500.000.000,00 dari total anggaran Rp 5.502.000.000,00 tidak terlaksana karena gagal lelang (2 paket) dan penyedia

mengundurkan diri (1 paket) disebabkan waktu pelaksanaan pekerjaan yang sangat terbatas diakhir tahun dan dimusim penghujan.

Pada Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang mendapatkan anggaran belanja langsung sebesar Rp 182.537.156.129,00 dengan realisasi sebesar Rp 167.961.837.810,00 atau (92,02%) terdiri dari 12 program 21 kegiatan dan 53 sub kegiatan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2024 maka realisasi anggaran pada tahun 2025 mengalami **peningkatan** sebesar **0,01%**.

Pada tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang mengampu penerimaan pendapatan daerah dengan target sebesar Rp 3.150.000.000,00 realisasi pendapatan daerah yang diperoleh adalah sebesar Rp 3.234.640.638,00 dengan capaian sebesar 102,69%. Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pendapatan yang diampu DPUPR Tahun 2025

No.	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
1	Retribusi Daerah	3.150.000.000	3.221.671.138	102,28
	a. Sewa tanah dan bangunan	424.636.748	554.525.750	130,59
	b. Sewa alat-alat berat	807.519.240	572.820.000	70,94
	c. Sewa alat-alat laboratorium	58.972.160	89.180.000	150,69
	d. Retribusi PBG	1.858.871.852	2.005.145.388	107,87
2.	Lain-lain PAD yang Sah	-	12.969.500	-
	a. Hasil Penjualan Tanaman	-	3.819.000	-
	b. Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/ Kontrak		9.150.500	
	JUMLAH	3.150.000.000	3.234.640.638	102,69

Sumber: SIPD Kabupaten Magelang Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat Tahun 2025 capaian pendapatan sebesar Rp 3.234.640.638,00 (102,69%) dengan target Rp 3.150.000.000,00 dibandingkan capaian pendapatan Tahun 2024 sebesar

Rp 3.181.567.439,00 dengan target Rp 3.000.000.000,00. Untuk capaian target pendapatan pada tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 terdapat peningkatan.

B. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan pelaksanaan dari Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2025 terhadap 1 (satu) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang.

Penetapan Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang 2025 - 2026. LKJIP ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan target pada Renstra 2025-2026 DPUPR.

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian kinerja sasaran agar diperoleh gambaran capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan melakukan analisis berikut :

- a. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2023	Capaian 2024	2025		
					Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Cakupan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan	80,60	88,67	93,03	93,13	100,11

	dan Penataan Ruang	Penataan Ruang					
--	--------------------	----------------	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, sasaran Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai 1 indikator sasaran yaitu Cakupan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Realisasi capaian pada Tahun 2025 SANGAT TINGGI dan naik dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 dan 2024.

Keberhasilan capaian kinerja didukung oleh :

1. Monitoring dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara periodik.
2. Perencanaan teknis yang sudah disiapkan tahun sebelumnya.
3. Adanya pembiayaan alternatif seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dari Provinsi.
4. Keberhasilan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam mendampingi Kelompok Masyarakat.
5. Dukungan dan peran serta masyarakat terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Koordinasi dan kerjasama yang baik diantara pemangku kepentingan terkait pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Masalah/kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas pada anggaran perubahan terutama yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.
2. Curah hujan yang tinggi pada akhir tahun sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan fisik.
3. Belum dilaksanakannya pengetesan sumber air bersih/minum sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023 secara berkala dan menyeluruh.
4. Belum adanya Instalasi Pengolah Limbah Terpadu (IPLT) di Kabupaten Magelang.
5. Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang

Strategi pemecahan masalah antara lain :

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan.
2. Memperkuat mekanisme pelaporan monitoring dan evaluasi setiap triwulan untuk memastikan pencapaian indikator dan memudahkan pengambilan keputusan terhadap kendala yang muncul selama pelaksanaan.
3. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait antara lain Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum (KPSPAM) dan Puskesmas untuk melaksanakan pengetesan sumber air bersih/minum secara berkala dan menyeluruh.
4. Menetapkan Lokasi Instalasi Pengolah Limbah Terpadu (IPLT) dan merencanakan DED Pembangunan IPLT di Tahun 2026.
5. Tetap melaksanakan koordinasi antar bidang dan perangkat daerah terkait dan meningkatkan kinerja serta peran dari masing-masing ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang.
6. Mencari sumber pendanaan diluar anggaran Pemerintah Kabupaten Magelang seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah, anggaran Jalan Inpres Daerah (IJD) dan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 11 Program dengan 11 indikator kinerja sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) dengan indikator kinerja Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan anggaran Rp 13.623.709.845,44,00 realisasi keuangan Rp. 9.000.338.203,00 atau (66,06%). Realisasi anggaran hanya 66,06%.

--	--



Meskipun demikian target cakupan pengelolaan sumber daya air dapat tercapai bahkan melebihi target karena semua kegiatan di anggaran penetapan terlaksana sesuai rencana, yaitu :

1. Target persentase sawah beririgasi 89,68% dengan realisasi 89,68%
2. Target persentase luas irigasi dalam kondisi baik 79,48% dengan realisasi 79,51%

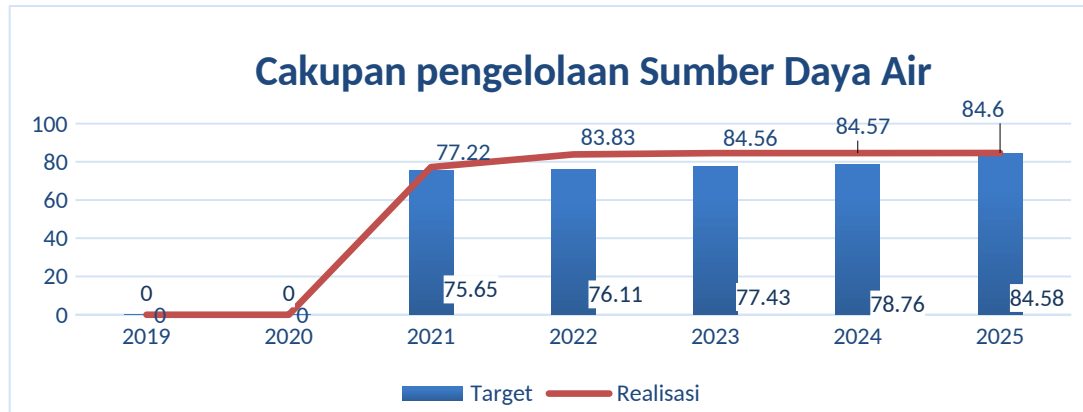
Sehingga target Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air 84,58% terealisasi sebesar 84,60%.

$$\text{(Persentase sawah beririgasi + Persentase luas irigasi dalam kondisi baik / 2)} \\ \text{(79,51+89,68)/2 = 84,60}$$

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Sasaran Indikator Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air	84,57	84,58	84,60	101,72

Sumber : Monitoring Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja telah melebihi target yang ditetapkan.

- Faktor pendorong capaian kinerja :
 - a. Monitoring dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara periodik
 - b. Adanya pembiayaan alternatif dari anggaran Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dari Provinsi yaitu sebesar Rp 5.502.000.000,00
- Faktor penghambat capaian kinerja :
 - a. Dari 34 paket pekerjaan ada 3 paket pekerjaan yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan kepada Kab./Kota dari Provinsi Jawa Tengah yang tidak bisa dilaksanakan yaitu :
 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kaliloro Ds. Wadas Kec. Kajoran senilai Rp 900.000.000,00.
 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidandang I, D.I. Sidandang II, dan D.I. Sidandang III Ds. Semen Cs. Kec. Windusari senilai Rp 2.250.000.000,00.
Kedua kegiatan ini tidak terlaksana karena gagal lelang dan tidak ada waktu lagi untuk lelang ulang.
 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Loning Ds. Balekerto Cs Kec. Kaliangkrik dan Kec. Tempuran senilai Rp 1.350.000.000,00
Kegiatan ini tidak terlaksana karena penyedia jasa pemenang lelang mengundurkan diri karena keterbatasan waktu pelaksanaan.
 - b. Waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas karena Anggaran Perubahan Bantuan Keuangan untuk Kab./Kota dari Provinsi Jawa Tengah baru diterima pada akhir tahun yaitu pada Tanggal 24

September 2025 sedangkan ketiga pekerjaan tersebut membutuhkan waktu cukup apalagi di musim penghujan.

- Solusi yang dilakukan : mengusulkan kembali kegiatan yang belum terlaksana di untuk Tahun 2026/2027

2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM dengan indikator kinerja Cakupan Layanan Air Minum

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan anggaran Rp 2.045.936.226,00 realisasi Rp 2.037.530.864,00 (99,59%). Pada Tahun 2025 dilaksanakan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di 4 lokasi yaitu :

1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Giritengah Kec. Borobudur
2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ngemplak Kec. Windusari
3. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kembangkuning Kec. Windusari
4. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Purwosari Kec. Tegalrejo



Capaian indikator Program Pengelolan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yaitu Cakupan Layanan Air Minum Layak di Tahun 2025 sebesar 95,54% sebagai berikut :

((Jumlah penduduk yang terlayani air minum/ Jumlah total penduduk) x 100%)

$$(438.890/459.388) \times 100 = 95,54$$

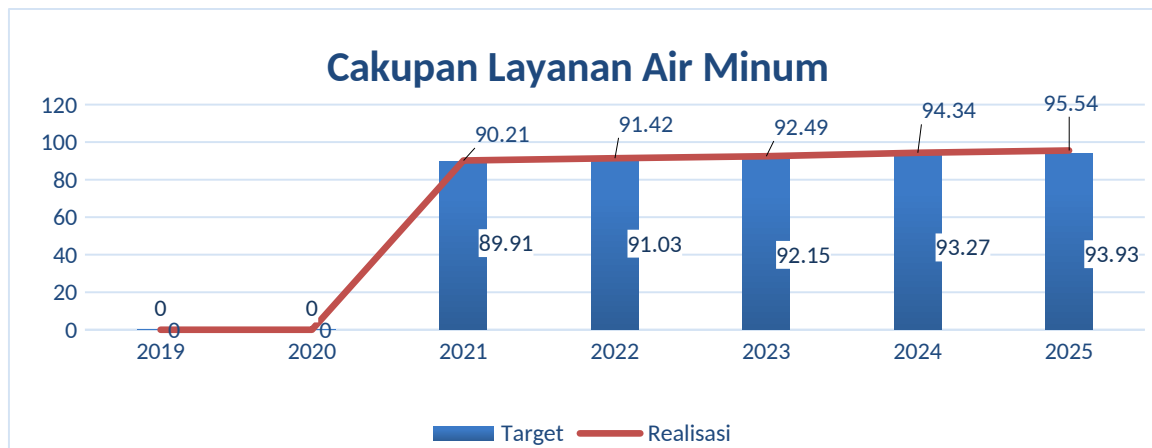
Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Sasaran Indikator Cakupan Layanan Air Minum

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Cakupan	Cakupan	94,34	93,92	95,54	101,72

30

dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Air Minum **				
--	----------------------	--	--	--	--

Sumber : Monitoring Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025



Dapat dilihat bahwa capaian target air minum layak melebihi target yang telah ditetapkan.

- Faktor pendorong capaian kinerja :
 - a. Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) yang telah berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan SPAM
 - b. Keberhasilan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam mendampingi Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM)
 - c. Dukungan positif dari Pemerintah Desa dalam melaksanakan SPAM
 - d. Dukungan positif warga/masyarakat terhadap pekerjaan SPAM
- Faktor penghambat capaian kinerja adalah lokasi pekerjaan pembangunan SPAM yang jauh dengan kondisi medan yang terjal dan adanya konflik internal desa.
- Solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat.

Sedangkan Sesuai amanat RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045, pencapaian tujuan penyediaan kebutuhan pokok air minum aman sehari-hari melalui indikator kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan sebagai berikut :

$$\text{PASMPP} = (\text{JRTASMPP} : \text{JRT}) \times 100\%$$

$$= 81.284/459.388 \times 100\%$$

$$= 17,69 \%$$

Keterangan :

PASMPP : Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan

JRTASMPP : Jumlah RT dengan akses air siap minum JP PDAM (telah aman/diuji sesuai Permenkes pada SR/sample setiap JDB/JDL)

JRT : Jumlah RT dengan akses air minum JP PDAM

Perbandingan capaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan Kabupaten Magelang dengan beberapa daerah sekitar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Realisasi 2025 (%)			
			Target Nasional	Target Provinsi	Kab. Magelang	Kab. Temanggung	Kab. Purworejo	Kota Magelang
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan*	33,00	10,97	17,69	60,21	34,14	89,43

Sumber : *Simanis CK Provinsi Jawa Tengah*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan Kabupaten Magelang atau air minum aman masih jauh dibawah target nasional tetapi telah melebihi target Provinsi Jawa Tengah dan masih dibawah capaian kabupaten sekitar, hal ini disebabkan karena belum dilakukan pengetesan sumber air bersih dan air minum sesuai kriteria Permenkes No. 2 Tahun 2023.

Solusi masalah ini adalah dengan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum (KPSPAM) dan Puskesmas untuk melakukan pengetesan sumber air minumnya secara berkala.

3. PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL dengan indikator kinerja Cakupan Layanan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dengan anggaran Rp 5.738.870.157,00 dan realisasi keuangan Rp 5.609.548.120,00 (97,75%).

Pada Tahun 2025 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R yang dilaksanakan adalah :

1. Pembangunan TPS3R Desa Surodadi Kec. Candimulyo
2. Pembangunan TPS3R Desa Jumoyo Kec. Salam
3. Pembangunan TPS3R Desa Sambak Kec.Kajoran
4. Pembangunan TPS3R Desa Mertoyudan Kec. Mertoyudan
5. Pembangunan TPS3R Desa Pancuranmas Kec. Secang
6. Pembangunan Penunjang TPST Klegan



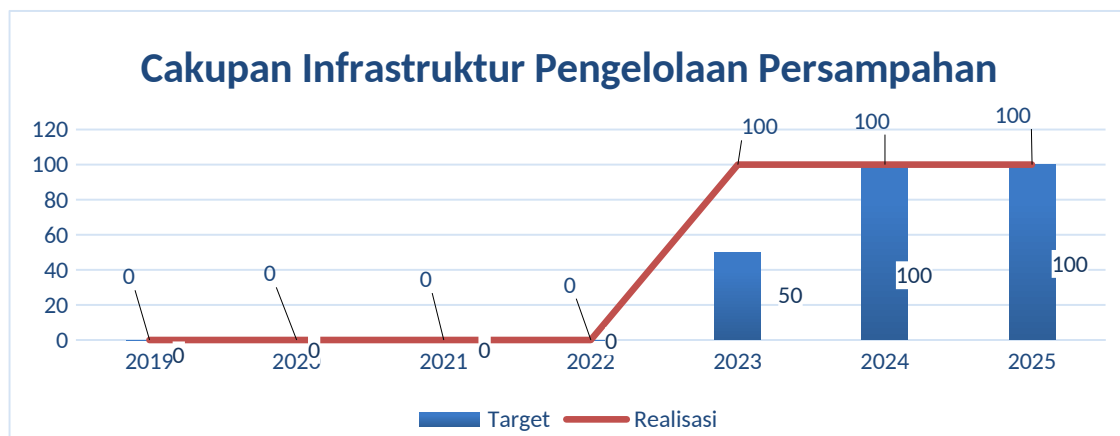
Capaian indikator Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional yaitu Cakupan Layanan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan sebagai berikut :

$$(\text{Persentase ketersediaan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R dan sarana prasarana persampahan}) = (6/6) \times 100 = 100$$

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Sasaran Indikator Cakupan Layanan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan Layanan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan	100	100	100	100

Sumber : Monitoring Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan.

- Faktor pendorong capaian kinerja :
 - a. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam melaksanakan pekerjaan persampahan
 - b. Keberhasilan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam mendampingi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
 - c. Dukungan positif dari Pemerintah Desa dalam melaksanakan pekerjaan persampahan
 - d. Dukungan positif warga/masyarakat terhadap pekerjaan persampahan
- Faktor penghambat capaian kinerja :
 - a. Adanya konflik internal desa
 - b. Kurang matangnya perencanaan pekerjaan persampahan

- Solusi yang dilakukan
 - a. Musyawarah desa
 - b. Membuat perencanaan pekerjaan dengan lebih baik

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH dengan indikator kinerja Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan anggaran Rp 7.053.054.466,07 realisasi keuangan Rp 7.050.685.080,00 (99,97%). Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah :

1. Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat berupa Pembangunan IPAL Skala Permukiman di 3 desa.
2. Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat berupa Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di 20 desa.



Capaian indikator Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah yaitu Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik adalah sebagai berikut :

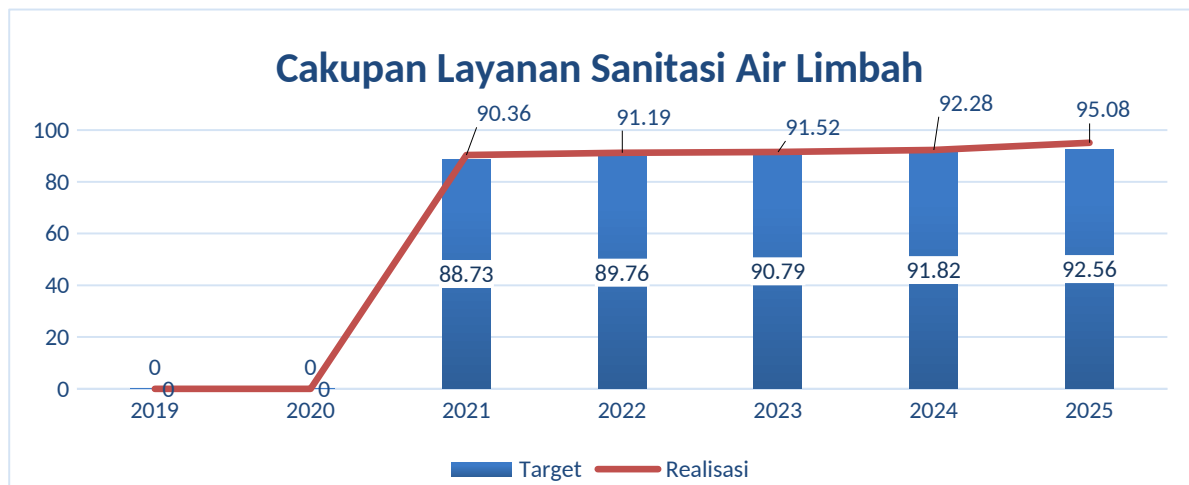
((Jumlah Penduduk yang terlayani air limbah domestik/ jumlah seluruh penduduk) x 100%)

$$(436.766/459.388) \times 100 = 95,08$$

Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja Sasaran Indikator Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik	92,28	92,56	95,08	102,72

Sumber : Monitoring Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target layanan sanitasi layak sudah melebihi target yang ditetapkan.

- Faktor pendorong capaian kinerja :
 - a. pengalaman Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam melaksanakan pekerjaan sanitasi air limbah
 - b. Keberhasilan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam mendampingi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
 - c. Dukungan positif dari Pemerintah Desa dalam melaksanakan pekerjaan sanitasi air limbah
 - d. Dukungan positif warga/masyarakat terhadap pekerjaan sanitasi air limbah

Sedangkan sesuai amanat RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045, pencapaian tujuan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik melalui indikator kinerja Rumah tangga dengan akses sanitasi aman sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{PSA} &= ((\text{JRTST} + \text{JRTIPLT}) : \text{JRTS}) \times 100\% \\
 &= (6.563 + 0) / 459.388 \times 100\% \\
 &= 1,43\%
 \end{aligned}$$

Keterangan :

PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman

JRTST = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T

JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)

JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya

Perbandingan capaian Rumah tangga dengan akses sanitasi aman Kabupaten Magelang dengan beberapa daerah sekitar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Rumah tangga dengan akses sanitasi aman dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025 (%)		Realisasi 2025 (%)			
			Target Nasional	Target Provinsi	Kab. Magelang	Kab. Temanggung	Kab. Purworejo	Kota Magelang
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman*	12,5	13,78	1,43	0,81	4,91	14,71

Sumber : Kementrian PU

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman Kabupaten Magelang masih sangat jauh dari target nasional maupun target Provinsi Jawa Tengah dan masih berada dibawah capaian Kabupaten Purworejo maupun Kota Magelang meskipun berada diatas capaian Kabupaten Temanggung.

- Faktor penghambatnya adalah karena belum adanya instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT) di Kabupaten Magelang.
- Solusi yang dilakukan adalah segera merencanakan Pembangunan IPLT antara lain dengan penetapan Lokasi IPLT dan pembuatan DED Pembangunan IPLT di Tahun 2026.

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE dengan indikator kinerja Cakupan Layanan Drainase Lingkungan

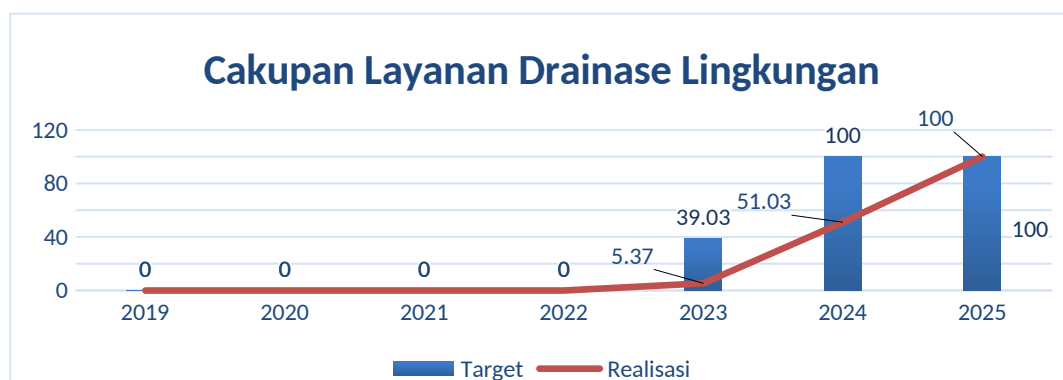
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan anggaran Rp 371.859.450,00 realisasi keuangan Rp 369.796.135,00 (99,45%).
Terdiri dari 1 kegiatan, 4 sub kegiatan dengan capaian 100%.



Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja Sasaran Indikator Cakupan Layanan Drainase Lingkungan

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
5	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan Layanan Drainase Lingkungan	51,03	100	100	100

Sumber : Monitoring Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan.

- Faktor pendorong capaian kinerja :
 - a. Hasil survei yang detail dan tepat terhadap masalah drainase yang akan dikerjakan
 - b. Pengawasan yang tepat dalam pelaksanaan pekerjaan
- Faktor penghambat capaian kinerja adalah anggaran yang terbatas padahal banyak saluran drainase yang harus diperbaiki
- Solusi yang dilakukan dengan membuat daftar prioritas agar masalah yang paling mendesak segera tertangani

6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG dengan indikator kinerja Cakupan Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung dengan anggaran Rp 19.175.783.037,88,00 realisasi keuangan Rp 18.697.618.965,00 (97,51%). Terdiri dari 1 kegiatan, dan 3 sub kegiatan dengan capaian 100%. Pada Tahun 2025 dilaksanakan pemeliharaan 16 gedung kantor dan Pembangunan 9 gedung kantor.

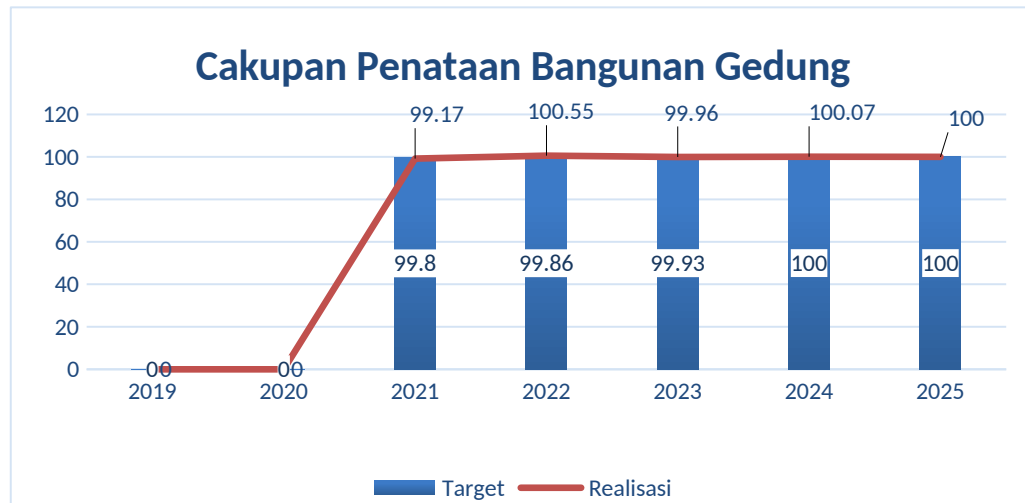


Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja Sasaran Indikator Cakupan Penataan Bangunan Gedung

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
6	Meningkatnya Cakupan dan	Cakupan	100	100	100	100

Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan Gedung				
--	--------------------------	--	--	--	--

Sumber : Monitoring Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan.

- Faktor pendorong capaian kinerja :
 - a. Sudah tersusun beberapa DED gedung pemerintah yang siap dilanjut ke tahap pembangunan/rehab fisik bangunan
 - b. Monitoring dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara periodik
 - c. Sudah ada sistem terpusat dalam proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
 - d. Koordinasi dan kerjasama yang baik diantara pemangku kepentingan
- Faktor penghambat capaian kinerja :
 - a. Keterbatasan jumlah SDM untuk pengawasan
 - b. Ketidaksiesuaian dokumen teknis PBG
- Solusi yang dilakukan :
 - a. Pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas.
 - b. Inovasi Layanan Informasi Digital PBG/SLF yaitu layanan informasi yang berisi layanan IKRK online, layanan gambar teknis gratis, dan

guidebook berkas persyaratan pengajuan PBG/SLF untuk beberapa fungsi bangunan.

7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA dengan indikator kinerja Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan anggaran Rp 191.561.168,00,00 realisasi keuangan Rp 191.561.168,00 (99,99%). Terdiri dari 1 kegiatan, dan 1 sub kegiatan dengan capaian 100%.



Tabel 3.14 Pengukuran Kinerja Sasaran Indikator Cakupan Penataan Bangunan Gedung

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
7	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	100	100	100	100

Sumber : Monitoring Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan.

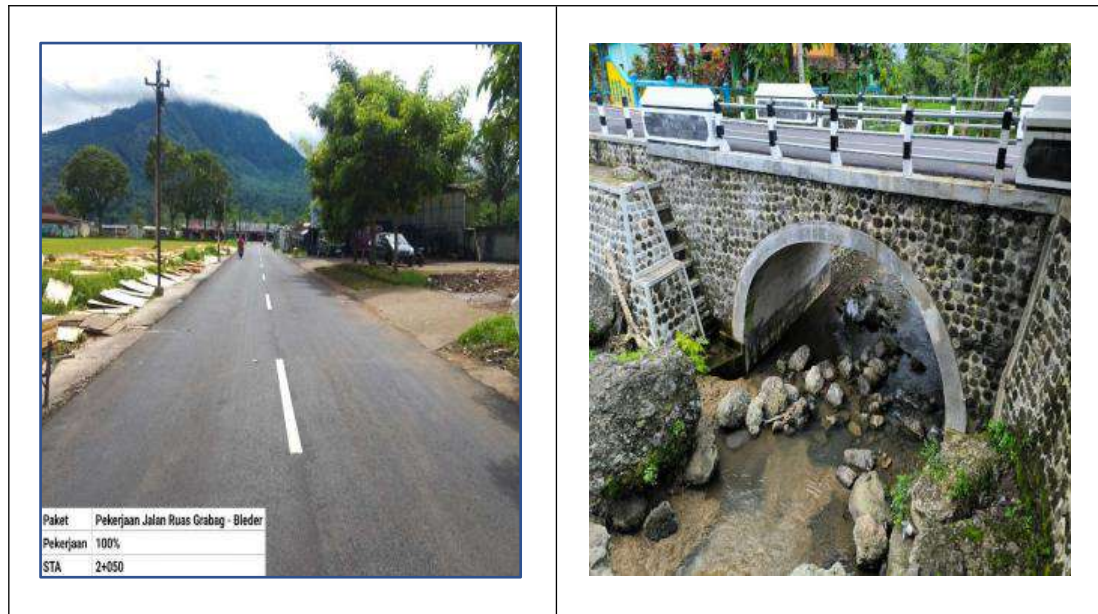
- Faktor pendorong capaian kinerja adalah monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan secara periodik
- Faktor penghambat capaian kinerja adalah kelompok penerima bantuan belum bisa membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan
- Solusi yang dilakukan dengan memberikan contoh laporan

8. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN dengan indikator Cakupan Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan dengan anggaran Rp 42.406.189.464,88 realisasi Rp 40.124.514.397,00 (94,62%) terdiri dari 1 kegiatan dan 9 sub kegiatan.

Dari anggaran tersebut pekerjaan yang telah dilakukan di Tahun 2025 adalah :

1. Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten sepanjang 174 km
2. Rehabilitasi Jalan sebanyak 42 paket
3. Pemeliharaan Berkala Jalan sepanjang 0,75 km
4. Rehabilitasi 5 buah jembatan
5. Rekonstruksi Jalan di 4 ruas jalan
6. Pemeliharaan Rutin 20 buah jembatan
7. Penyusunan 1 buah dokumen FS dan DED Jalur Tambang



Tabel 3.15 Pengukuran Kinerja Sasaran Indikator Cakupan Penyelenggaraan Jalan

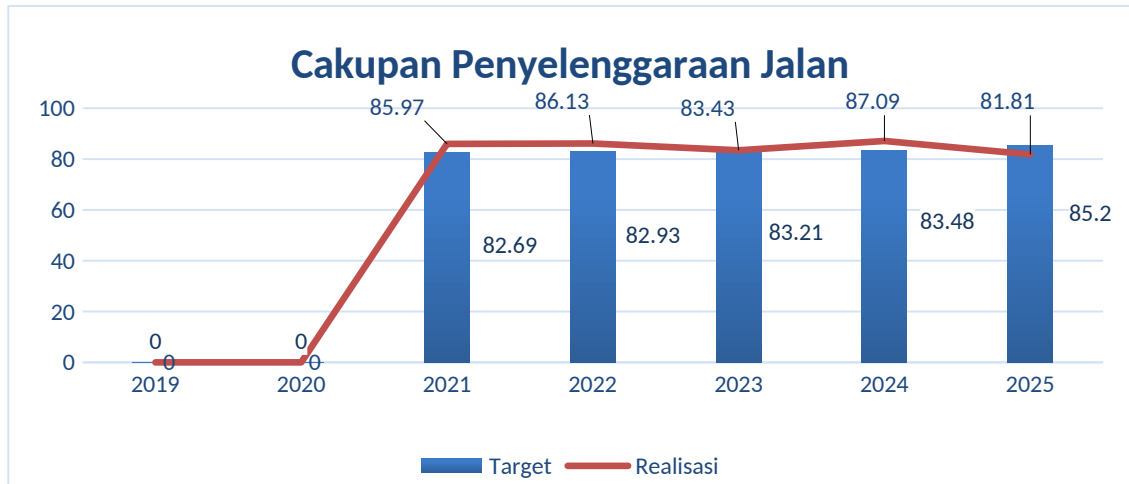
No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
8	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan Penyelenggaraan Jalan	87,09	85,20	81,81	96,02

Sumber : Monitoring Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

Capaian indikator Program Penyelenggaraan Jalan yaitu Cakupan Penyelenggaraan Jalan adalah sebagai berikut :

(persentase jalan kondisi mantap + persentase bangunan pelengkap jalan kondisi baik)/2

$$(70,72+92,90)/2 = 81,81$$



Dari tabel dapat dilihat bahwa target indikator pada Tahun 2025 tidak tercapai karena pada tahun ini tingkat kemantapan jalan yaitu kondisi jalan baik dan sedang menurun disebabkan keterbatasan anggaran yang ada sehingga kegiatan pada tahun 2025 lebih banyak untuk pekerjaan saluran dan bahu jalan yang memang juga sangat dibutuhkan mengingat musim hujan yang panjang sedangkan peningkatan jalan berupa overlay jalan hanya sepanjang 6,2 km.

Namun demikian pada Tahun 2025 ini telah dilakukan peningkatan jalan di Ruas Jalan Salam - Kaligesik dengan konstruksi beton sepanjang 2,6 km oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui anggaran Inpres Jalan Daerah (IJD) senilai yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar karena jalan tersebut sebelumnya rusak berat akibat dilalui oleh truk pengangkut pasir.



- Faktor pendorong capaian kinerja :
 - a. Monitoring dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara periodik

- b. Adanya pembiayaan alternatif seperti Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dari Provinsi dan Inpres Jalan Daerah (IJD)
- Faktor penghambat capaian kinerja :
 - a. Banyaknya angkutan truk pasir yang melewati jalan kabupaten dengan beban muatan tidak sesuai kelas jalan
 - b. Hujan deras yang menyebabkan banjir
 - c. Terbatasnya anggaran pemerintah daerah
- Solusi yang dilakukan adalah :
 - a. Membangun jalan dengan konstruksi beton
 - b. Membangun/memperbaiki drainase jalan
 - c. Bekerja sama dengan kepolisian dan dinas perhubungan untuk menertibkan kendaraan yang lewat agar sesuai kelas jalan
 - d. Selalu mencari sumber pendanaan alternatif
 - e. Inovasi LAPOR PAK D 2J (Pelaporan Kondisi Jalan dan Jembatan) yaitu platform digital yang memudahkan masyarakat melaporkan kondisi atau permasalahan jalan dan jembatan secara cepat dan praktis melalui handphone tanpa harus datang ke kantor DPUPR Kabupaten Magelang. Sistem ini mengintegrasikan laporan masyarakat, identifikasi permasalahan, data teknis survei petugas, program penanganan, hingga status tindak lanjut dalam satu dashboard terpantau secara realtime serta didukung arsip data digital yang tertata otomatis. Melalui inovasi ini, pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi lebih efektif dan efisien dari sisi waktu dan anggaran, serta mendukung penentuan program penanganan yang lebih tepat sasaran.

9. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI dengan indikator kinerja Cakupan Layanan Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan anggaran Rp 288.206.500,00 realisasi Rp 280.951.989,00 (97,48%) yang terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun 2025 adalah :

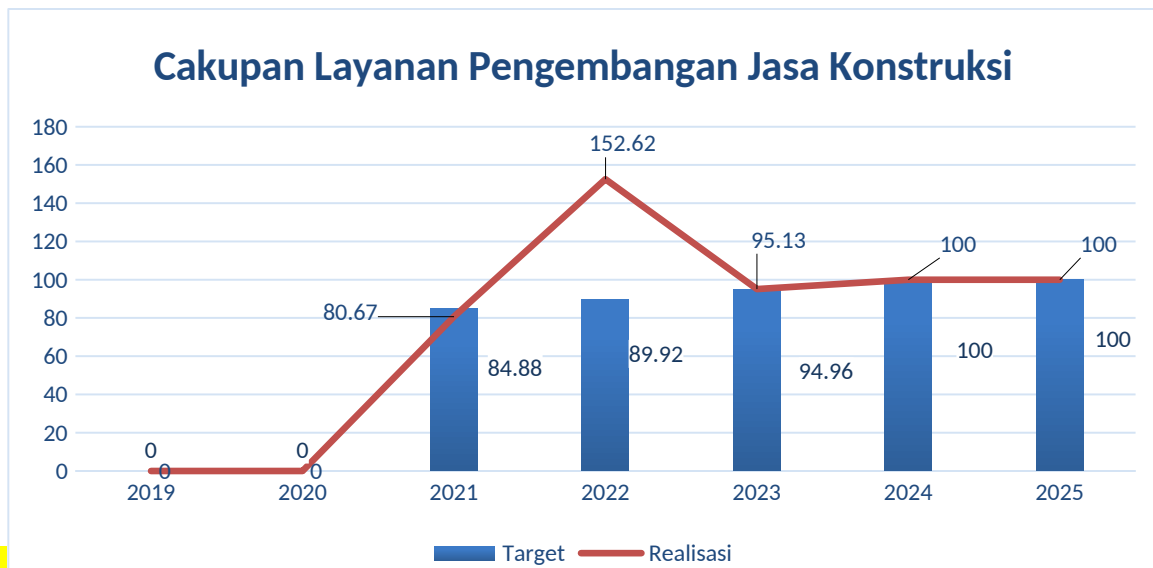
1. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis berupa pelatihan tukang dan pelatihan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diikuti oleh 630 orang
2. Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis untuk 50 orang
3. Penyusunan 1 buah dokumen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
4. Pembinaan Jasa Konstruksi di Kabupaten Magelang



Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja Sasaran Indikator Cakupan Pengembangan Jasa Konstruksi

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
9	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan Layanan Pengembangan Jasa Konstruksi	100	100	100	100

Sumber : Monitoring Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan.

- Faktor pendorong capaian kinerja :
 - a. Dukungan regulasi untuk menciptakan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan peningkatan kualitas pelaku usaha
 - b. Dukungan daerah dalam Pembinaan tenaga kerja konstruksi dan badan usaha
 - c. Perluasan layanan pelatihan dan sertifikasi
- Faktor penghambat capaian kinerja :
 - a. Keterbatasan SDM Pembina Jasa Konstruksi
 - b. Keterbatasan anggaran pembinaan jasa konstruksi
 - c. Masih banyak pelaku usaha tidak tertib administrasi dan pengawasan yang lemah
- Solusi yang dilakukan :
 - a. Inovasi PONDASI (Podcastnya Dunia Konstruksi DPUPR) yaitu ruang berbagi informasi, inovasi, dan inspirasi seputar pembangunan infrastruktur. Mengupas tuntas dunia konstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, dengan menghadirkan narasumber kompeten dari internal DPUPR maupun praktisi di bidangnya yang menjadi jembatan transparansi dan edukasi bagi masyarakat tentang pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan, dan akuntabel.

- b. Inovasi GO KONSTRUKSI (Gerakan Online Konstruksi Terintegrasi) yaitu inovasi layanan umum yang diterapkan oleh DPUPR Kabupaten Magelang yang berfungsi diantaranya adalah (1) Kontraktor dapat memesan pengujian (beton, tanah, aspal), memantau status sampel secara real-time, dan mengunduh sertifikat hasil uji digital dengan QR Code untuk validasi keaslian; (2) Peminjaman alat berat secara online tanpa perlu datang ke dpupr, alat datang ke Lokasi anda; (3) Mobile Construction Lab (Lab Keliling): Unit laboratorium bergerak yang mendatangi proyek konstruksi, terutama di daerah terpencil atau proyek strategis, untuk melakukan uji tanah atau beton secara cepat, sehingga tidak perlu membawa sampel ke laboratorium pusat; (4) Aplikasi jasa konstruksi (untuk data kontraktor dan konsultan se kab, data shs, hspk dan asb), perkiraan RAB bangunan dll.; (5) Layanan pelatihan tenaga konstruksi keliling (minimal peserta 25 org per sesi).

10. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG dengan indikator kinerja Cakupan Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan anggaran Rp 747.022.749,00 realisasi Rp 643.617.959,00 (86,16%). Realisasi anggaran hanya 86,16% karena ada sisa anggaran perjalanan dinas yang direncanakan untuk mengikuti kegiatan bantuan teknis dari kementerian yang ternyata Tahun 2025 tidak diselenggarakan.

Kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025 adalah :

1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mungkid dan Sekitarnya yang diundangkan pada 27 Maret 2025 melalui Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mungkid dan Sekitarnya Tahun 2025-2045.
2. Penyusunan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Rencana Detail Tata Ruang, antara lain:
 - a. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Secang- Grabag;
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tegalrejo; dan
 - c. Rencana Detail Tata Ruang Bagian Kawasan Perkotaan Muntilan.



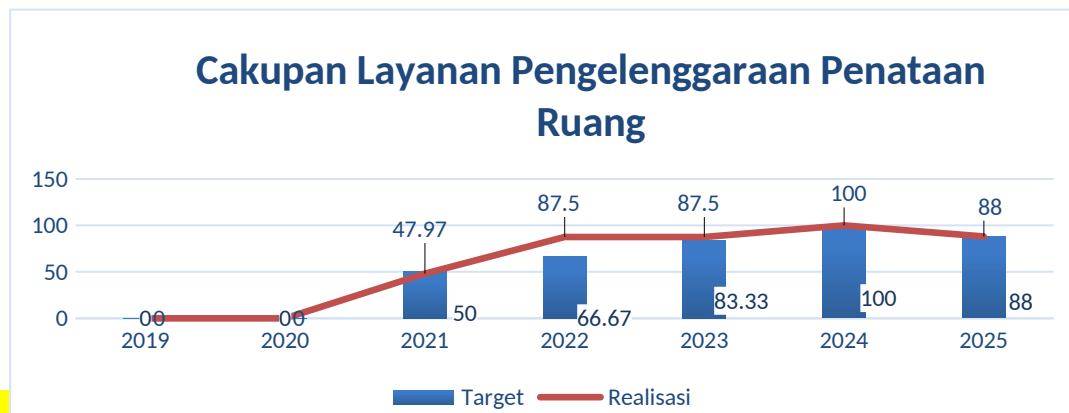
(cakupan perencanaan tata ruang, + cakupan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan) /2

$$((76+100)/2) \times 100 \% = 88\%$$

Tabel 3.17 Pengukuran Kinerja Sasaran Indikator Cakupan Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
10	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	100	88	88	100

Sumber : Monitoring Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan.

- Faktor pendorong capaian kinerja :
 - a. Koordinasi antar stakeholder yang berjalan dengan baik

- b. Peningkatan kapasitas SDM dalam merespon dinamika perubahan regulasi
- Faktor penghambat capaian kinerja :
 - a. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM
 - b. Belum optimalnya penguasaan data kebutuhan sektoral yang diperlukan dalam perencanaan tata ruang
- Solusi yang dilakukan :
 - a. Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
 - b. Penguatan kapasitas Forum Penataan Ruang

11. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN dengan indikator kinerja Cakupan Layanan Kinerja Pertanahan

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan anggaran Rp 38.201.487,00 dengan realisasi Rp 34.459.130,00 (90,20%).

Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota ditujukan untuk memfasilitasi pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Magelang, diantaranya :

1. Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen
2. Pembangunan TSPT Regional
3. Pembangunan Kampung Seni Borobudur



Capaian indikator Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Jalan yaitu Cakupan Layanan Kinerja Pertanahan adalah sebagai berikut :

(persentase penetapan lokasi dan sengketa pertanahan + persentase kegiatan tanah obyek reformasi agraria + persentase penatagunaan tanah)/3

$$((100+100+100)/3) \times 100\% = 100$$

Tabel 3.18 Pengukuran Kinerja Sasaran Indikator Cakupan Layanan Kinerja Pertanahan

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
11	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan Layanan Kinerja Pertanahan	100	100	100	100

Sumber : Monitoring Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan.

- Faktor pendorong capaian kinerja :
 - a. Pelaksanaan musyawarah yang efektif
 - b. Kepatuhan terhadap prosedur
 - c. Partisipasi Masyarakat

- Faktor penghambat capaian kinerja :
 - a. Ketidaksiesuaian nilai ganti rugi
- Solusi yang dilakukan dengan melakukan musyawarah

c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi. Analisis efisiensi merupakan perbandingan antara pencapaian kinerja sasaran strategis dengan persentase realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut.

Penghitungan analisis efisiensi dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja yang tingkat capaiannya 100% atau lebih. Capaian kinerja sasaran strategis dan capaian indikator kinerja tingkat capaiannya kurang dari 100% tidak dilakukan analisis efisiensi. Analisis efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.19. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air	100,02	66,06	33,96
2	Layanan Infrastruktur	Cakupan layanan air minum	101,72	99,59	2,13
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan layanan infrastuktur pengelolaan persampahan	100,00	97,75	2,25
4		Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik	102,72	99,97	2,75
5		Cakupan layanan drainase lingkungan	100,00	99,45	0,55
6		Cakupan Penataan Bangunan Gedung	100,00	97,51	2,49
7		Cakupan penataan bangunan dan lingkungannya	100,00	99,99	0,01
9		Cakupan layanan Pengembangan Jasa	100,00	97,48	2,52

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
		konstruksi			
10		Cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang	100,00	86,16	13,94
11		Cakupan layanan kinerja pertanahan	100,00	90,20	9,80
Rata-rata tingkat efisiensi:					7,04

Tingkat efisiensi pencapaian kinerja dibandingkan realisasi anggaran pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 7,04%. Tingkat efisiensi ini belum menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran secara riil. Hal ini dikarenakan sisa anggaran pada kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi, kegiatan dimaksud adalah :

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kaliloro Ds. Wadas Kec. Kajoran
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidandang I, D.I. Sidandang II, dan D.I. Sidandang III Ds. Semen Cs. Kec. Windusari
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Loning Ds. Balekerto Cs Kec. Kaliangkrik dan Kec. Tempuran

d. Analisis komitmen peningkatan kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan komitmen melalui inovasi sebagai berikut :

1. LAPOR PAK D 2J (Pelaporan Kondisi Jalan dan Jembatan) yaitu platform digital yang memudahkan masyarakat melaporkan kondisi atau permasalahan jalan dan jembatan secara cepat dan praktis melalui handphone tanpa harus datang ke kantor DPUPR Kabupaten Magelang. Sistem ini mengintegrasikan laporan masyarakat, identifikasi permasalahan, data teknis survei petugas, program penanganan, hingga status tindak lanjut dalam satu dashboard terpantau secara realtime serta

didukung arsip data digital yang tertata otomatis. Melalui inovasi ini, pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi lebih efektif dan efisien dari sisi waktu dan anggaran, serta mendukung penentuan program penanganan yang lebih tepat sasaran.

2. PONDASI (Podcastnya Dunia Konstruksi DPUPR) yaitu ruang berbagi informasi, inovasi, dan inspirasi seputar pembangunan infrastruktur. Mengupas tuntas dunia konstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, dengan menghadirkan narasumber kompeten dari internal DPUPR maupun praktisi di bidangnya. Podcast ini menjadi jembatan transparansi dan edukasi bagi masyarakat tentang pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan, dan akuntabel.
3. GO KONSTRUKSI (Gerakan Online Konstruksi Terintegrasi) yaitu inovasi layanan umum yang diterapkan oleh DPUPR Kabupaten Magelang yang berfungsi diantaranya adalah (1) Kontraktor dapat memesan pengujian (beton, tanah, aspal), memantau status sampel secara real-time, dan mengunduh sertifikat hasil uji digital dengan QR Code untuk validasi keaslian; (2) Peminjaman alat berat secara online tanpa perlu datang ke dpupr, alat datang ke Lokasi anda; (3) Mobile Construction Lab (Lab Keliling): Unit laboratorium bergerak yang mendatangi proyek konstruksi, terutama di daerah terpencil atau proyek strategis, untuk melakukan uji tanah atau beton secara cepat, sehingga tidak perlu membawa sampel ke laboratorium pusat; (4) Aplikasi jasa konstruksi (untuk data kontraktor dan konsultan se kab, data shs, hspk dan asb), perkiraan RAB bangunan dll.; (5) Layanan pelatihan tenaga konstruksi keliling (minimal peserta 25 org per sesi).
4. Layanan Informasi Digital PBG/SLF yaitu layanan informasi yang berisi layanan IKRK online, layanan gambar teknis gratis, dan guidebook berkas persyaratan pengajuan PBG/SLF untuk beberapa fungsi bangunan.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 ini dapat dilihat bahwa capaian kinerja 1 (satu) sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebesar 100,11% dengan predikat sangat tinggi. Hal ini menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis melebihi target dan capaian realisasi anggaran sebesar 92,03% dengan kategori sangat tinggi.

Adapun beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 antara lain :

1. Monitoring dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara periodik.
2. Perencanaan teknis yang sudah disiapkan tahun sebelumnya.
3. Adanya pembiayaan alternatif seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dari Provinsi.
4. Keberhasilan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam mendampingi Kelompok Masyarakat.
5. Dukungan dan peran serta masyarakat terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Koordinasi dan kerjasama yang baik diantara pemangku kepentingan terkait pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, antara lain :

1. Waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas ada anggaran perubahan terutama yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.
2. Curah hujan yang tinggi pada akhir tahun sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan fisik.
3. Belum dilaksanakannya pengetesan sumber air bersih/minum sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023 secara berkala dan menyeluruh.
4. Belum adanya Instalasi Pengolah Limbah Terpadu (IPLT) di Kabupaten Magelang.
5. Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi masalah-masalah diatas maka selanjutnya akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan.
2. Memperkuat mekanisme pelaporan monitoring dan evaluasi setiap triwulan untuk memastikan pencapaian indikator dan memudahkan pengambilan keputusan terhadap kendala yang muncul selama pelaksanaan.
3. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait antara lain Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum (KPSPAM) dan Puskesmas untuk melaksanakan pengetesan sumber air bersih/minum secara berkala dan menyeluruh.
4. Menetapkan Lokasi Instalasi Pengolah Limbah Terpadu (IPLT) dan merencanakan DED Pembangunan IPLT di Tahun 2026.
5. Melanjutkan pelaksanaan inovasi Layanan Informasi Digital PBG/SLF, LAPOR PAK D 2J (Pelaporan Kondisi Jalan dan Jembatan), PONDASI (Podcastnya Dunia Konstruksi DPUPR) dan GO KONSTRUKSI (Gerakan Online Konstruksi Terintegrasi).

6. Tetap melaksanakan koordinasi antar bidang dan perangkat daerah terkait dan meningkatkan kinerja serta peran dari masing-masing ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang.
7. Mencari sumber pendanaan diluar anggaran Pemerintah Kabupaten Magelang seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah, anggaran Jalan Inpres Daerah (IJD) dan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 ini disusun agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

Kota Mungkid, 23 Februari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang



DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196805111998031005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAVID RUDIYANTO, ST., MT.

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.

Jabatan : Pj. BUPATI MAGELANG

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 14 Januari 2025

PIHAK KEDUA



SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA



DAVID RUDIYANTO, ST., MT.

Pembina Utama Muda
NIP. 196805111998031005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	<i>Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang</i>	<i>Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	93,03 %

No	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.704.668.206,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2025
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.433.906.212,00	
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.056.854.738,11	
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.276.851.387,00	
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.354.295.951,28	
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	374.999.659,00	
7	Program Penataan Bangunan Gedung	11.978.000.971,00	
8	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	309.976.501,00	
9	Program Penyelenggaraan Jalan	29.774.851.744,00	
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	282.206.500,00	
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.039.323.629,00	
12	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	49.474.517,00	
JUMLAH TOTAL		67.635.410.015	

Kota Mungkid, 14 Januari 2025

PIHAK KEDUA



SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA



DAVID RUDIYANTO, ST., MT.

Pembina Utama Muda
NIP. 196805111998031005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : GRENGSENG PAMUJI

Jabatan : BUPATI MAGELANG

Selaku atasan langsung pihak pertama , selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 17 Oktober 2025.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

GRENGSENG PAMUJI

DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199803 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93,03 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN SUMBER DANA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.305.319.270,93	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	13.623.709.845,44	
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.045.936.226,00	
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.738.870.157,00	
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.053.054.466,07	
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	371.859.450,00	
7	Program Penataan Bangunan Gedung	19.175.783.037,88	
8	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	191.577.949,00	
9	Program Penyelenggaraan Jalan	42.406.189.464,88	
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	288.206.500,00	
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	747.022.749,00	
12	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	38.201.487,00	
JUMLAH TOTAL		94.985.730.603,20	

Kota Mungkid, 17 Oktober 2025.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

GRENGSENG PAMUJI

DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199803 1 005

RENCANA AKSI PENCAPAIAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERAAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAGELANG

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Target Triwulan				Program	Anggaran	Keterangan
			Angka	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93,03	%	88,45	88,71	89,81	93,03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.305.319.270,93	
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.623.709.845,44	
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.045.936.226,00	
									PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	5.738.870.157,00	
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG	7.053.054.466,07	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Target Triwulan				Program	Anggaran	Keterangan
			Angka	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									AN SISTEM AIR LIMBAH		
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	371.859.450,00	
									PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	19.175.783.037,88	
									PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	191.577.949,00	
									PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	42.406.189.464,88	
									PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	288.206.500,00	
									PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	747.022.749,00	
									PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN	38.201.487,00	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Target Triwulan				Program	Anggaran	Keterangan
			Angka	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNA N		

Kota Mungkid, 17 Oktober 2025.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Magelang

DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Soekarno-Hatta No.6, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang 56511
Telp (0293) 788186, Fax (0293) 788186
Laman www.dpupr.magelangkab.go.id Pos el dpupr@magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 13 Januari 2026.

Yth. : Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Magelang
di
Kota Mungkid

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 865/159/2026

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Monitoring PK Triwulan IV Tahun 2025 DPUPR.	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang



David Rudiyanto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199803 1 005

MONITORING CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Tribulan :- I/II/III/IV*)

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja	Tipe Penghitungan	Target		Tribulan I			Tribulan II			Tribulan III			Tribulan IV			Keterangan
				Rens tra	PK	Realisasi	(%)	Uraian	Realisasi	(%)	Uraian	Realisasi	(%)	Uraian	Realisasi	(%)	Uraian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kumulatif	93,03	93,03	88,67	95,31	Analisis : Target kinerja belum tercapai, sampai akhir tribulan I sebagian besar paket pekerjaan masih dalam proses persiapan, kegiatan yang bersifat rutin sudah berjalan	88,67	95,31	Analisis : Target kinerja belum tercapai dan masih mengacu capaian akhir 2024 dan sampai akhir tribulan II sebagian besar paket pekerjaan masih dalam proses persiapan dan lelang, baru sebagian kecil yang sudah dalam proses pelaksanaan, kegiatan yang bersifat rutin sudah berjalan	88,67	95,31	Analisis : Target kinerja sampai akhir tribulan III belum tercapai meskipun sebagian besar paket penetapan sudah dalam proses pelaksanaan, kegiatan yang bersifat rutin sudah berjalan dan dengan telah ditetapkannya anggaran perubahan terdapat tambahan paket pekerjaan dan dalam tahapan koordinasi pelaksanaan pengadaan.	92,43	99,36	Analisis : Target kinerja sampai akhir triwulan IV 2025 realisasi tidak tercapai sesuai target dikarenakan terdapat salah satu program tidak tercapai, meskipun 11 program lainnya tercapai.	

									di anggaran perubahan, sambil menunggu arahan lebih lanjut.			proses pengadaan.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	-------------------	--	--	--

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



David Rudianto, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199803 1 005

Keterangan :

- Kolom 1 : Jelas
- Kolom 2 : Sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
- Kolom 3 : Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
- Kolom 4 : Tipe penghitungan adalah kumulatif atau non kumulatif
- Kolom 5 : Target indikator kinerja pada Renstra
- Kolom 6 : Target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja
- Kolom 7 : Realisasi capaian kinerja pada tribulan yang bersangkutan
- Kolom 8 : Persentase capaian kinerja indikator **positif**: $(\text{Kolom 7} / \text{kolom 6} \times 100\%)$
Persentase capaian kinerja indikator **negatif**: $((\text{kolom 6} - (\text{lolom 7} - \text{kolom 6})) / \text{kolom 6} \times 100\%)$
- Kolom 9 : Uraian atas capaian kinerja, terdiri dari :
Analisis : Gambaran kondisi saat ini berdasarkan realisasi target kinerja.
Hambatan/Permasalahan : Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah
Rencana Aksi : Tindakan/ rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target kinerja
- Kolom 10-12 : Sama dengan kolm 7- 9
- Kolom 13-15 : Sama dengan kolm 7- 9
- Kolom 16-18 : Sama dengan kolm 7- 9

Kolom 19 : Apabila diperlukan keterangan tambahan

*) Coret yang tidak perlu



**INSPEKTORAT
KABUPATEN MAGELANG**

**Laporan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja**

**DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAGELANG**

700/111/03/2025

1 JULI 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT

Jalan Soekarno Hatta No 59 ☎ (0293) 788215, Fax (0293) 788122
Kota Mungkid 56511 Website : www.inspektorat.magelangkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAGELANG

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
- 6) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Magelang Nomor : 700.1/276/03/2025 tanggal 17 Juni 2025.

b. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja, untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang :

- 1) Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Renstra dan Renstra Perubahan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100 (dalam bentuk *Template* Lembar Kriteria Evaluasi/LKE) dan prosentase penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD pada setiap komponen sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Kinerja 30%
- 2) Pengukuran Kinerja 30%
- 3) Pelaporan Kinerja 15%
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25%

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-

komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut :

AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).
D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

Sedangkan Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut :

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3

	<p>unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.</p>
<p>B (Nilai > 60 – 70)</p>	<p>Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</p>
<p>CC (Nilai > 50 – 60)</p>	<p>Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</p>
<p>C (Nilai > 30 – 50)</p>	<p>Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</p>
<p>D (Nilai > 0 – 30)</p>	<p>Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</p>

f. Gambaran Umum Unit Kerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang

pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya, bidang penataan ruang dan pertanahan serta kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya, bidang penataan ruang dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya, bidang penataan ruang dan pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang bina marga, pengairan, cipta karya, penataan ruang dan pertanahan;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
- g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya, bidang penataan ruang dan pertanahan;
- h. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya, bidang penataan ruang dan pertanahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang sebagai berikut:

1) Kepala Satuan Kerja

Nama : David Rudiyanto, S.T., M.T.
NIP : 19680511 199803 1 005
Pangkat/golongan : Pembina Tingkat I / IVb

2) Sekretaris

Nama : Parjan, S.T., M.T.
NIP : 19710405 200312 1 005
Pangkat/golongan : Pembina / IVa

3) Kepala Bidang Sumber Daya Air

Nama : Dewi Erna Mujiastuti, S.T., M.T.
NIP : 19810415 200604 2 012
Pangkat/golongan : Pembina / IVa

4) Kepala Bidang Bina Marga

Nama : Priyo Suwarso, S.T., M.T.
NIP : 19731026 199803 1 004

Pangkat/golongan : Pembina /IVa

5) Kepala Bidang Cipta Karya

Nama : Nuryanto, S.T., M.T.

NIP : 19710721 200312 1 006

Pangkat/golongan : Pembina /IVa

6) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Nama : Adang Adfan Ludhantono, S.T., M.T.

NIP : 19830210 200604 1 005

Pangkat/golongan : Pembina /IVa

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setiap tahunnya telah menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan menjadi sample reuiu AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Magelang mulai tahun 2018 dengan hasil sebagai berikut:

No	Tahun Evaluasi	Hasil penilaian	Keterangan
1	2019	58,66	CC (Cukup)
2	2020	70,38	BB (Sangat Baik)
3	2021	73,13	BB (Sangat Baik)
4	2022	85,15	A (Memuaskan)
5	2023	86,10	A (Memuaskan)
6	2024	83,60	A (Memuaskan)

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi tahun sebelumnya

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi tahun sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 sudah dilakukan.

2. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Nilai Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memperoleh nilai (84,85) dengan predikat A.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang.

Adapun uraian hasil evaluasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

1) **Perencanaan Kinerja (30%)**

Hasil evaluasi terhadap komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27 dengan rincian sebagai berikut :

a) Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia memperoleh nilai 5,4.

- b) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) memperoleh nilai 8,1.
- c) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai 13,5.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat diuraikan bahwa telah terdapat dokumen perencanaan yang memadai, telah memenuhi standar perencanaan kinerja dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang sesuai.

2) Pengukuran Kinerja (30%)

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja memperoleh nilai 25,5 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pengukuran Kinerja telah dilakukan memperoleh nilai 5,4.
- b) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan memperoleh nilai 8,1.
- c) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai 12.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat diuraikan bahwa sudah ada pedoman pengumpulan data kinerja dan pengukuran indikator kinerja sudah cukup terdefinisi dan jelas. Terdapat kelemahan pada level organisasi dalam melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, yaitu belum dilengkapinya bukti penilaian SKP tahun 2024 pada UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Grabag dan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Bandongan. ✓

Pimpinan ikut terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja. Untuk pemberian *Reward* dan *Punishment* diberikan berdasarkan capaian kinerja organisasi.

3) Pelaporan Kinerja (15%)

Hasil evaluasi terhadap komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,1 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja memperoleh nilai 2,7.
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya memperoleh nilai 3,15.

- c) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai 5,25.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat diuraikan bahwa laporan kinerja telah disusun berkala, sesuai pedoman, dan telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4) Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)

Hasil evaluasi terhadap komponen Evaluasi Internal memperoleh nilai 21,25 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan memperoleh nilai 4,5.
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai memperoleh nilai 6,75.
- c) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja memperoleh nilai 10.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat diuraikan bahwa Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang sudah melaksanakan peningkatan implementasi SAKIP.

- b. Terhadap kelemahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang agar melengkapi bukti penilaian SKP tahun 2024 pada UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Grabag dan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Bandongan. ✓

3. Penutup

a. Simpulan

Pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan belum didukung dengan bukti yang lengkap, yaitu bukti penilaian SKP tahun 2024 pada UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Grabag dan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Bandongan.

- b. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik untuk tahun yang akan datang agar melakukan perbaikan pada Dokumen Pengukuran Kinerja dengan melengkapi bukti penilaian SKP tahun 2024 pada UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Grabag dan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Bandongan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dan selanjutnya, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 1 Juli 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN MAGELANG


IWAN SUTIARSO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701201 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Soekarno-Hatta No. 06, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang 56511
Telp. (0293) 788186, Fax. (0293) 788186 Website :
www.dpupr.magelangkab.go.id, Email : dpupr@magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 1 Agustus 2025

Kepada

Yth. Inspektur Kabupaten Magelang
di -

Kota Mungkid

Nomor : 700/1052/06/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

Menanggapi surat dari Inspektur Kabupaten Magelang mengenai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 kami sampaikan sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tanggapan	Rencana Tindak Lanjut
1	Perbaikan pada Dokumen Pengukuran Kinerja dengan melengkapi bukti penilaian SKP Tahun 2024 pada UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Grabag dan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Bandongan.	Bukti penilaian SKP Tahun 2024 pada UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Grabag dan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah Bandongan sudah diupload pada link bukti dukung pada tanggal 2 Juli 2025.	Akan selalu memantau pengukuran pencapaian kinerja terutama bukti penilaian SKP di tahun-tahun berikutnya.

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG,



DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 196805111998031005